

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN *MINIMUM ESSENTIAL FORCE* KOMPONEN UTAMA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

Oleh:

Aris Sarjito¹, Yusuf Ali², dan Andy Fefta Wijaya³

arissarjito@gmail.com

Abstract

This research is a qualitative research that aims to identify and describe the results of a policy evaluation of the Main Essential Force (MEF) of the Indonesian National Armed Forces Navy (TNI AL). The focus of the research is the effectiveness of the MEF Policy of the Indonesian Navy's Main Components. Data and information obtained by in-depth interviews, observation and documentation.

The results of the study indicate that effectiveness has not been achieved because the MEF of the Navy's Main Components is not in accordance with the target. The ability of the main tools and weapons systems is largely not yet equipped with the latest technology and integrated systems, so that it cannot quickly and timely identify, deter and adjudicate threats. MEF Policy The main components of the TNI AL are basic forms of power that must meet certain standards and have deterrence effects. The conclusion shows that the MEF Policy of the Navy's Main Components has not been effective against the community's need for sea water security, because there are still violations.

Keywords: policy evaluation, effectivity, main component, minimum essential forces

¹ Dosen Tetap Universitas Pertahanan

² Sekretaris Program Studi Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan

³ Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Secara geopolitik melalui aspek *maritime*, dilihat dari perspektif global mempunyai wilayah yang strategis. Indonesia terletak diantara dua benua Asia dan Australia serta dua samudera Atlantik dan Pasifik sebagai jalur komunikasi laut yang penting. Dua samudera ini memiliki nilai strategis yang signifikan untuk kepentingan nasional, kawasan sekitarnya dan kepentingan negara-negara besar.

Indonesia dengan luas wilayah sekitar 5.219.270 km², memiliki 17.508 pulau dan sekitar 6000 pulau diantaranya adalah berpenghuni. Luas daratan sekitar 1.919.270 km² dikelilingi oleh sekitar 3.3 juta km² laut teritorial yang merupakan 2/3 dari total luas wilayah Indonesia. Jarak dari utara ke selatan adalah sekitar 1.770 km dan 5.152 km dari Timur ke Barat atau 1/8 dari keliling dunia (Goltenboth, 2006).

Keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan di satu sisi memiliki posisi strategis namun sekaligus menjadi tantangan besar dalam mengamankannya. Sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki

tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan beberapa *choke points* yang strategis bagi kepentingan global, seperti di Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar.

Sehubungan dengan pembukaan ALKI, kapal-kapal pelayaran internasional baik kapal niaga maupun kapal perang dapat melintas tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dan kapal selam dapat melintas tanpa harus muncul dipermukaan. Tiga jalur ALKI yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah tersebut merupakan alur laut utara-selatan dan belum mencakup semua alur laut yaitu alur laut timur-barat.

Mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia, keberadaan TNI AL masih jauh dari harapan untuk dapat menjadi armada angkatan laut yang kuat dan tangguh. Saat ini kapal perang angkatan laut yang dimiliki Indonesia rata-rata berumur di atas 25 tahun, demikian juga dengan kapal selamnya. Untuk itu perlu didorong penyediaan fasilitas armada pengawasan untuk memperkuat pertahanan di wilayah *maritime boundary*.



- Luas wilayah perairan : 5.800.000 Km²
- Panjang garis pantai : 80.791 Km
- Luas wilayah laut Teritorial: 3.100.000 Km²
- Panjang base line : 13.179 Km
- Luas wilayah laut ZEE : 2.700.000 Km²
- Jumlah pulau : 17.499 Pulau

Sumber: Markas Besar TNI AL, 2015.

Gambar 1.1 Konstelasi Geografi Perairan Indonesia

Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia (2008:17), pengamanan ALKI serta seluruh *choke points* tersebut merupakan agenda strategis bagi kepentingan nasional Indonesia serta masyarakat internasional.

Indonesia memprediksi ancaman yang akan dihadapi sekarang dan di masa yang akan datang. Pada lingkup global antara lain masalah yang dihadapi meliputi isu terorisme, kelangkaan energi, krisis pangan dan air, pemanasan global, *cyber-crime*, *pandemic*, dampak krisis ekonomi global, serta pencemaran lingkungan.

Pada lingkup *regional* masalah yang dihadapi antara lain meliputi isu konflik perbatasan dan berbagai kejahatan lintas batas seperti penyelundupan senjata, penyelundupan manusia, pencurian kekayaan alam di darat maupun di laut, dan perompakan di laut. Sementara pada lingkup nasional masalah yang dihadapi meliputi antara lain isu perbatasan dan pulau-pulau terluar, terorisme, separatis, radikalisme, serta keamanan maritim dan dirgantara. Berdasarkan kesadaran bahwa keamanan adalah kepentingan semua pihak dan ancaman selalu bersifat multi-dimensional, maka konsep keamanan komprehensif berupaya menciptakan stabilitas keamanan secara damai melalui keterpaduan komprehensif semua upaya di segala aspek kehidupan. (Iskandar, JOM FISIP Volume 1 NO 2-Oktober 2014).

Selain itu perdagangan dunia masih didominasi oleh perdagangan lintas samudra, secara prinsipil, jalur laut lebih *accessible* dan efektif. Jalur perdagangan dunia dibedakan atas 7 *choke point* yang 5 di antaranya ada di Indonesia. Selat malaka merupakan jalur perdagangan sekaligus sarang perompak internasional di antara 3 negara; Indonesia, Malaysia, dan Singapura.



Sumber: Conny Rahakundini Bakrie dalam seminar Geopolitik Political Science Fair 2012

Gambar 1.2 Geografi Strategis Indonesia

Wilayah Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia (1.782 km), Timor Leste (228 km), dan Papua Nugini (820 km). Indonesia juga berbatasan laut dengan India, Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, dan Australia. Dengan posisi ini, Indonesia menghadapi potensi ancaman dari 10 negara yang berbatasan langsung meski dengan tingkat dan jenis berbeda-beda (Sucipto, 2014). Belum tuntasnya masalah perbatasan maritim dengan beberapa negara dapat saja memantik sengketa sebagaimana mencuatnya berbagai insiden dengan Malaysia belakangan ini. Di samping masalah perbatasan, Indonesia berkepentingan menjaga empat *choke point* terpenting

di dunia: Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar, dan Selat Lombok.



Sumber: Markas Besar TNI AL.

Gambar 1.3 Peta Perbatasan Laut NKRI

Negara-negara di kawasan Asia-Pasifik memiliki beberapa alasan untuk meningkatkan kemampuan militer nasionalnya. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan yang mengalami dinamika keamanan yang terus berubah dengan munculnya kekuatan besar China dan India, ancaman dan tantangan keamanan baru (serangan peluru kendali, terorisme, penyebaran senjata pemusnah massal, kejahatan internasional, dan sebagainya), sengketa teritorial yang berkelanjutan (seperti Pulau Senkaku/Diaoyutai dan Spratlys), dan komitmen militer (seperti operasi kontijensi dan stabilitas) yang memerlukan kemampuan *surveillance*, proyeksi kekuatan, mobilitas, daya tembak, dan operasi gabungan. Seluruh faktor di atas mengakibatkan aktivitas *regional* untuk memodernisasi militernya (Tellis, 2010). China dan

India memiliki aspirasi menjadi kekuatan besar yang mendorong untuk memodernisasi militernya yang mempunyai kemampuan proyeksi kekuatan terus menerus, mengirim serangan tembakan presisi, dan dominasi informasi peperangan.

Ketegangan yang meningkat ini terjadi dalam konteks strategis meningkatnya anggaran pertahanan dalam beberapa tahun terakhir oleh negara-negara yang berdekatan dengan Laut China Selatan dan secara ekonomis serta strategis langsung dipengaruhi oleh perkembangan di Laut China Selatan. *Stockholm International PeaceResearch Institute (SIPRI) Military Expenditure Database* melaporkan bahwa belanja militer negara-negara Asia Timur meningkat dari \$ 144 milyar tahun 1998 menjadi \$ 318.000.000.000 di tahun 2013. Belanja pertahanan per kapita dari negara-negara antara tahun 1998 – 2013 juga menunjukkan peningkatan yang signifikan (Chapman, 2014: 21):

Tabel 1.1 Regional Defense Spending Increases

Country	Year		
	1998	2003	2013
Australia	\$ 380		\$ 1.033
Brunei	\$ 927		\$ 1.015

China	\$ 14.60		\$ 138,50
Indonesia	\$ 3		\$ 31.60
Japan	\$ 290		\$ 381.70
Malaysia	\$ 51.80		\$ 161.60
Philippines	\$ 16.50		\$ 35.62
Singapore *)	\$ 7.47		\$ 11.69
South Korea	\$ 226		\$ 675.60
Taiwan	\$ 421		\$ 449.90
Vietnam		\$ 10.50	\$ 37.80

Sumber: Chapman, Bert, 2014.

China's Nine-Dashed Map: Maritime Source of Geopolitical Tension, Purdue University, Purdue e-Pubs, Purdue University Libraries, West Lafayette, IN, pp.22.

*)

<http://www.indexmundi.com/facts/singapore/military-expenditure>

Pertumbuhan ekonomi yang signifikan dari negara-negara tersebut memungkinkan peningkatan pengeluaran pertahanan tanpa menghabiskan persentase anggaran tambahan pengeluaran tahunan pemerintah seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1.2 The Significant Economic Growth of Regional Countries

Country	Year		
	1998	2003	2013
Australia	5.7%		4.4%
Brunei	12.1%		6.7%
China	11.9%		8.3%
Indonesia	3.8%		4.4%
Japan	2.7%		2.4%
Malaysia	6.4%		5.2%
Philippines	9.1%		6.8%
Singapore)	2.2%		4.1%
South Korea	6.4%		12.8%
Taiwan	11.6%		11.0%
Vietnam		7.6%	5.1%

Sumber: Chapman, Bert, 2014.

China's Nine-Dashed Map: Maritime Source of Geopolitical Tension, Purdue University, Purdue e-Pubs, Purdue University Libraries, West Lafayette, IN, pp.23.)*
<https://www.mti.gov.sg/MTIInsights/Pages/1998---2009.aspx>

Peningkatan ketegangan di wilayah Laut China Selatan cenderung didorong oleh peningkatan belanja pertahanan negara-negara kawasan yang mendekati belanja pertahanan

China, peningkatan ketegangan *regional*, dan poros Amerika Serikat di Asia-Pasifik yang memainkan peran penting dalam memastikan kerentanan wilayah Laut China Selatan terhadap konflik *regional* atau internasional. Konflik tersebut mungkin akan melibatkan atau mempengaruhi kekuatan dari luar Laut China Selatan seperti Australia, Jepang, dan AS dan lebih jauh akan berdampak pada kepentingan India dan Eropa (Chapman, 2014: 23).

Modernisasi militer China didukung oleh peningkatan anggaran bidang pertahanan dan militer yang signifikan. Peningkatan anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan angkatan bersenjata China di masa yang akan datang dengan mengutamakan modernisasi pertahanan dalam tubuh angkatan bersenjata yang memiliki efisiensi yang tinggi dan pendanaan yang rendah. Berdasarkan dokumen resmi pertahanan China, *China's White Paper on National Defense 2008*, disebutkan bahwa prinsip dasar peningkatan anggaran pertahanan dan militer angkatan bersenjata China, didasarkan kesinambungan yang sama antara kebutuhan pertahanan dan pertumbuhan pembangunan ekonomi. (Purwanto, Spektrum, Jurnal Ilmu

Politik Hubungan Internasional, Volume No. 2 – Oktober 2014).

Dalam kurun waktu kurang lebih 30 tahun sejak China membuka diri terhadap pasar pada tahun 1979, China telah berupaya untuk membangun kekuatan angkatan bersenjata dalam negeri yang kuat dan selaras dengan pertumbuhan serta pembangunan ekonomi China. Untuk itu peningkatan anggaran pertahanan dan militer angkatan bersenjata China selalu di pertahankan pada tingkat yang wajar dan disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi China. Dari tahun 1978 sampai dengan tahun 1987, China yang memfokuskan diri terhadap pembangunan ekonomi memberikan porsi anggaran yang kecil terhadap anggaran pertahanan. (Purwanto, Spektrum, Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional, Volume No. 2 – Oktober 2014).

Pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1997, China secara bertahap mulai meningkatkan anggaran pertahanan dan militernya dengan tujuan menjaga keamanan nasional dan kesatuan China yang didasarkan pertumbuhan ekonomi China yang berkesinambungan. Selama periode tersebut, rata-rata dari peningkatan anggaran pertahanan China adalah sekitar 14,5 persen dari PDB dalam

negeri China saat itu yang mencapai 20,7 persen. Selanjutnya dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2007 China terus meningkatkan anggaran pertahanannya secara signifikan dengan dasar pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat dan bertujuan untuk menjaga keamanan nasional pembangunan dalam negeri China. (Purwanto, Spektrum, Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional, Volume No. 2 – Oktober 2014).

Ancaman potensial terhadap Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan negara-negara di Asia Tenggara yang tanpa sadar terjebak dalam perlombaan senjata. Hal ini disebabkan upaya oleh Amerika Serikat untuk menambah kekuatan militer sebagai keseimbangan kekuatan terhadap kekuatan militer China di Laut Cina Selatan. Pertumbuhan ekonomi Cina menambah belanja militer, perluasan kepentingan Cina ke wilayah yang lebih luas menjadi strategi utama yang mengubah lanskap. Baru-baru ini, Beijing melanggar status quo di wilayah yang disengketakan, terutama dalam hal klaim maritim di Laut Cina Selatan (Medcalf, 2014: 3).

Indonesia terus memperhatikan masalah keamanan eksternal yang ditimbulkan oleh negara tetangga atas

perbatasan keamanan Indonesia. Dalam hal ini, masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia sering menjadi salah satu yang paling sensitif. Seperti Indonesia diketahui memiliki masalah dengan perbatasan maritim Malaysia. Kedua negara berdebat mengklaim Ambalat dan mengirim kapal perang untuk melindungi kepentingan mereka. Sumber-sumber Indonesia mengklaim bahwa Malaysia telah melanggar Ambalat 76 kali pada tahun 2007, 23 kali pada tahun 2008, dan 11 kali pada tahun 2009. Perbatasan internasional di wilayah tersebut belum ditentukan untuk setiap negara mengklaim wilayah tersebut (Kebijakan Strategi Pertahanan & Luar Negeri, 2009: 3).

Kesulitan melihat wilayah Indonesia yang berpotensi konflik terbuka adalah perairan Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan Kepulauan Natuna. Tiongkok memiliki beberapa klaim teritorial oleh negara-negara di sekitarnya, termasuk dengan Indonesia mengenai garis sembilan garis putus-putus (*Nine dashes lines*) ke perairan di sekitar pulau-pulau Natuna pada Peta 1992. Hingga saat ini, Cina belum dapat menjelaskan dengan jelas ke Indonesia atasklaim sembilan garis putus-putus.

Pada 2012, belanja militer di Asia Tenggara hanya 11,7% dari total belanja militer Asia Timur. Secara keseluruhan, belanja militer Asia Tenggara meningkat sebesar 62% antara 2002 dan 2012. Indonesia dan Vietnam adalah dua negara terbesar dalam pembelanjaan militer pada periode 2002 dan 2012, yaitu: Indonesia 125% dan 131% Vietnam. Indonesia menetapkan MEF dan berencana untuk mencapai *Green Water Navy* pada tahun 2024 (European Institute for Asian Studies Event Report, 2013).

Untuk menghadapi ancaman aksi militer dan pertahanan, pemerintah Indonesia berusaha mencapai kemerdekaan strategis dengan lima kebijakan. Pertama, meningkatkan kemampuan militer melalui proses pertahanan modernisasi. Yang kedua, dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pemerintah secara bertahap menaikkan anggaran pertahanan untuk mendukung modernisasi militer. Presiden berjanji untuk meningkatkan anggaran pertahanan menjadi 1,5% dari PDB. Ketiga, Indonesia menghindari ketergantungan pada satu sumber senjata dan material militer. Keempat, Indonesia berusaha untuk secara bertahap mengurangi persenjataan impor dengan

membangun kembali industri pertahanan. Kelima, Indonesia mengembangkan kepentingan nasionalnya melalui kerja sama pertahanan dan diplomasi.

Kebijakan MEF Komponen Utama TNI adalah pedoman dalam membangun kekuatan militer yang dimaksudkan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Kekuatan angkatan laut ditetapkan dalam "Striking Force" yang terdiri dari 110 kapal, "Patrol Force", 66 kapal, dan "Supporting Force", 98 kapal. Lampiran Keputusan Menteri Pertahanan No. KEP / 25 / M / I / 2014 Tanggal: 7 Januari 2014 Tentang Kebijakan Pertahanan Nasional 2014 menyatakan bahwa prioritas dan fokus pengembangan postur pertahanan militer diarahkan pada MEF melalui rematerialisasi; revitalisasi; relokasi; dan pengadaan untuk meningkatkan mobilitas dan kemampuan unit tempur Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, khususnya *Rapid Strike Reaction Force*, menyiapkan Pasukan Reaksi Cepat untuk Manajemen Bencana, mendirikan Operasi Penjagaan Perdamaian dan menyiapkan pasukan Batalyon sebagai kekuatan siaga .

Pengembangan MEF sangat mendesak untuk dilaksanakan karena

kualitas dan kuantitas alat utama dan sistem senjata tidak lagi sesuai dengan kemampuan yang diharapkan. Bahkan sebagian besar alat utama dari sistem senjata Angkatan Laut dengan usia rata-rata 30 tahun.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Minimum Essential Force (MEF) Komponen Utama Tentara Indonesia menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak diarahkan pada konsep perlombaan senjata serta strategi pengembangan untuk memenangkan perang total, tetapi sebagai bentuk kekuatan dasar yang memenuhi standar tertentu dan memiliki efek *deterrence*. Sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan kekuatan minimum yang harus dimiliki oleh TNI AL yang memiliki efek jera dalam menghadapi ancaman sehingga pemerintah dapat memberikan keamanan bagi masyarakat di perairan laut Republik Indonesia. Kebijakan MEF Komponen Utama TNI AL perlu dikaji, sehingga dapat diketahui seberapa besar efektivitas Kebijakan MEF komponen Utama TNI AL.

LANDASAN TEORI

1. Kebijakan Publik.

Apakah yang dimaksud kebijakan publik? Kebijakan publik dalam definisi Dye yang terkenal adalah apa pun yang dipilih atau dilakukan oleh pemerintah. Interpretasi kebijakan menurut Dye di atas harus ditafsirkan dengan dua hal penting: pertama, bahwa kebijakan harus dilakukan oleh instansi pemerintah, dan kedua, kebijakan berisi seleksi yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah (Indiahono, 2009: 17).

Kebijakan publik dijelaskan William N. Dunn sebagai berikut: "Kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang saling terkait yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah di bidang yang berkaitan dengan tugas-tugas administrasi seperti keamanan dan pertahanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kejahatan, perkotaan dan lalu lintas. "(Dunn, 1994). Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang saling terkait yang diciptakan oleh pemerintah sesuai dengan tugas masing-masing seperti keamanan dan pertahanan, energi, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

Penelitian ini merupakan Evaluasi Kebijakan Komponen Utama MEF Angkatan Laut Indonesia. Kebijakan tersebut dibuat oleh Menteri Pertahanan untuk memenuhi target minimum alat utama yang harus dimiliki oleh sistem senjata Indonesia.

2. Evaluasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang telah dilaksanakan harus dievaluasi. Evaluasi kebijakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil implementasi kebijakan MEF Komponen Utama TNI AL yang akan digunakan sebagai *input* dalam pelaksanaan kebijakan ke depan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Scriven, evaluasi kebijakan tersebut disebut sebagai evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang biasanya dilakukan ketika program tertentu sedang dikembangkan dan lebih dari sekali dengan tujuan untuk melakukan perbaikan. Evaluasi formatif dilakukan di beberapa titik selama pengembangan program dan kegiatan. (Scriven, 1981: 63). Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai dan untuk kepentingan beberapa audiensi eksternal atau pengambil keputusan

dan dapat dilakukan oleh evaluator internal atau eksternal atau campuran keduanya. Alasan kredibilitas, jauh lebih mungkin melibatkan evaluator eksternal. (Scriven, 1981: 150).

3. Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik.

Kriteria tersebut ditetapkan sebagai patokan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik. William N. Dunn mengemukakan kriteria evaluasi kebijakan, sebagai berikut: “Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan harus dikembangkan beberapa kriteria atau indikator, karena ketika menggunakan indikator tunggal bias bisa menjadi hasil penilaiannya yang nyata. Kriteria evaluasi dikembangkan oleh Dunn (1994: 405) meliputi enam kriteria, yaitu:

Tabel 1: Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik.

No.	Criteria	explanation
1.	Effectiveness	Has the desired result been achieved?
2.	Efficiency	How much

		efforts is required to achieve the desired results
3.	Adequacy	How far the results have been achieved to solve the problem?
4.	Equity	What are the costs and benefits which distributed evenly to different sections of society?
5.	Responsiveness	Does the policy outcome load preferences / group values and can satisfy them?
6.	The accuracy	Are the results that achieved useful?

Sumber: Dunn, 1994.

4. Efektivitas.

Efektivitas adalah salah satu kriteria evaluasi yang telah diusulkan oleh kebijakan W.N. Dunn. Menurut Dunn, efektivitas diukur dengan pertanyaan: "Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?"

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Bedeian dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas adalah *That is, the greater the extent it which an organization's goals are met or surpassed, the greater its effectiveness* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Bedeian, 1991: 61).

Dunn dalam bukunya yang berjudul *"Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua"* (2003), menyatakan bahwa:

"Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat)

yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya" (Dunn, 2003:429).

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan" (Mahmudi, 2005:92). Ditinjau dari segi pengertian efektifitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauh mana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Pendapat lain juga

dinyatakan oleh Susanto, yaitu: "efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi" (Susanto, 1975:156). Berdasarkan definisi tersebut, peneliti beranggapan bahwa efektivitas bisa tercipta jika pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi khalayak yang diterpanya.

METODOLOGI RISET

Penelitian ini bersifat kualitatif. Menurut Moleong (2014: 3): "Penelitian kualitatif menunjukkan kualitas makna yang mengacu pada aspek alami yang bertentangan dengan kuantum dan angka". Atas dasar penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang tidak memegang perhitungan ". Bogdan & Taylor dalam Moleong (2014: 4), Menjelaskan:" Penelitian kualitatif juga dapat didefinisikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati ".

Studi ini akan mengevaluasi efektivitas Kebijakan MEF Komponen Utama TNI AL. Pendekatan kualitatif adalah cara yang didasarkan pada filosofi post-positivisme, digunakan untuk memeriksa kondisi alam objek di

mana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan tujuan dan bola salju, data teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasilnya lebih menekankan pada maknageneralisasi (Sugiyono, 2008).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles, dkk, (2014: 31-33). Metode analisis terus dilakukan selama penelitian, dengan menggabungkan tahap interaktif dan melingkar: pengumpulan data, kondensasi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi.

Untuk memperoleh validitas data dari hasil penelitian dalam penelitian ini dilakukan pemeriksaan langkah-langkah data seperti yang diusulkan oleh Lincoln dan Guba (1985: 290-296).Yaitu; kredibilitas; observasi terus menerus, ditriangulasi, diskusikan dengan rekan kerja dan dosen; pengalihan; ketergantungan dan konfirmabilitas.

HASIL PENELITIAN

Efektivitas dalam konteks ini cenderung berfokus pada proses pelaksanaan. Pertanyaan besarnya adalah apakah upaya organisasi dalam melaksanakan kebijakan tersebut mengikuti gagasan manajemen yang efektif berkaitan dengan struktur, personil, penganggaran, pengambilan keputusan, dan sebagainya? Kebijakan MEF Komponen Utama TNI AL adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan kekuatan minimum yang harus dimiliki oleh Angkatan Laut yang memiliki efek jera dalam menghadapi ancaman sehingga pemerintah dapat memberikan keamanan untuk orang-orang di perairan laut NKRI. Dengan demikian Kebijakan MEF Komponen Utama TNI AL adalah bentuk kekuatan dasar yang memenuhi standar tertentu dan memiliki efek jera (efek *deterrence*).

Ancaman berkembang sedemikian rupa sehingga ancaman dinamis saat ini merupakan wilayah yang kompleks. Hasilnya menunjukkan bahwa dinamika ancaman regional sekarang cukup kompleks. Karena itu, penegasan paradigma berwawasan ke luar Indonesia telah dimulai sejak reformasi 1998, perlu direalisasikan,

bukan sekadar wacana di atas kertas. (Bakri, 2015)

Sebagai bentuk reaksi, kebijakan MEF dari Komponen Utama TNI AL, harus merespons ancaman dengan baik. Kebijakan MEF dari Komponen Utama TNI AL yang diarahkan pada pencapaian MEF sebagai kekuatan pertahanan yang mampu mendeteksi, mengidentifikasi dan mencegah potensi ancaman atau aktual. Pengamat politik Connie Rahakundini Bakri memberi ide bentuk responsif Kebijakan MEF Komponen Utama TNI AL terhadap Kebijakan Green Water Cina.

Perspektif militer dalam sudut pandang keamanan maritim pada keamanan nasional dalam upaya untuk melindungi integritas teritorial dari serangan musuh atau negara lain menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan kepentingan negara di luar wilayah kedaulatannya. Sementara pertahanan melihat keamanan maritim mencakup masalah yang lebih luas dan khususnya terhadap ancaman yang muncul (Klein, 2010).

Kebijakan MEF Komponen Utama TNI AL adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan kekuatan minimum yang harus dimiliki

oleh Angkatan Laut yang memiliki efek jera dalam menghadapi ancaman sehingga pemerintah dapat memberikan jaminan keamanan nasional di perairan tanah air. Dengan demikian Kebijakan MEF Komponen Utama TNI AL adalah bentuk kekuatan dasar yang harus memenuhi standar tertentu dan memiliki efek jera.

Efektifitas diperlukan dalam pelayanan publik karena ini merupakan bukti kemampuan pemerintah untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menetapkan agenda dan prioritas layanan dan mengembangkan program untuk layanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Dwiyanto, 2002). Dalam hal ini, Kebijakan Komponen Utama MEF TNI AL adalah kemampuan pemerintah untuk menyediakan apa yang menjadi tuntutan rakyat di bidang keamanan dan pertahanan (Smith in Widodo; 2001). Pelayanan publik harus diterima oleh warga dengan kondisi yang optimal, karena itu hak warga negara dan pemerintah sebagai pemberi layanan (pelayan publik) wajib patuh. (Amirudin, 2002: 114).

Efektivitas Kebijakan MEF Komponen Utama TNI AL dalam mendeteksi ancaman kekerasan di Tanah Air masih dianggap kurang. Sebagai bentuk respon,

Kebijakan MEF dari Komponen Utama TNI AL, harus mampu merespon ancaman dengan baik. Kebijakan MEF Komponen Utama TNI AL diarahkan pada pencapaian MEF sebagai kekuatan pertahanan yang mampu mendeteksi, mengidentifikasi dan menangkal ancaman potensial atau aktual. Sebagai bentuk respon, Kebijakan MEF Komponen Utama TNI AL atas Kebijakan *Green Water* Cina seharusnya masalah MEF telah diubah oleh Kementerian Pertahanan hari ini "(Bakri, 2015).

Saat ini telah ada perubahan yang signifikan terhadap keamanan dalam negeri khususnya untuk pengurangan penebangan liar, penangkapan ikan ilegal, dan penambangan ilegal. Namun menurut pengamatan peneliti, pengurangan pembalakan liar, penangkapan ikan ilegal dan penambangan liar tidak sepenuhnya diakibatkan oleh Kebijakan Komponen MEF, tetapi hasil koordinasi dengan kementerian terkait yang memiliki program untuk mengatasi masalah keamanan di laut. perairan tanah air.

Efektifitas kebijakan MEF Komponen Utama TNI AL dalam mendeteksi ancaman kekerasan di tanah air masih dianggap kurang jika dilihat dari data pelanggaran yang terjadi. Dari berbagai sumber, peneliti

meringkas beberapa pelanggaran tabel berikut:
tanah air seperti yang disajikan dalam

Table 2. Pelanggaran Wilayah oleh Negara Asing.

No	Nama Kapal/Pesawat	Negara	Tahun	Lokasi
1.	1 TLDM Ship 3 Tugboat 4 Tongkang	Malaysia	2014	Tanjung Datu, Kalimantan Barat.
2.	Helicopter	Malaysia	2015	helipad Yonif 521 Kampung Aji Kuning, Middle Sebatik District, Nunukan Regency, North Kalimantan.
3.	Cessna208Registration Number N354RM.	United States of America	2012	Sepinggan, Balikpapan.
4.	Civilian aircraft types Beechcraft 9L with tail number VH-PFK.	-	2014	Natuna, Kepulauan Riau.
5.	Military aircraft C-130 Hercules	Malaysia	2016	Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau.
6.	Australian Navy Ships	Australia	2013	ZEE Indonesia.
7.	The ship Ocean Protector	Australia	2014	Pelabuhan Ratu, Jawa Barat.
8.	Chinese fishing trawlers	China	2010	Natuna waters
9.	Chinese fishing trawlers	China	2013	Natuna waters
10.	1 Coastguard Ship 1 fishing boat	China	2016	Natuna waters
11.	1 Coastguard Ship 3 fishing boats	China	2016	Natuna waters
12.	Fishing vessel GuiBei	China	2016	Zona Ekonomi

	Yu			Eksklusif (ZEE) on Natuna waters, Kepulauan Riau
13.	Seven Seas Fishing Vessel belonging to Odyssey Marine PTE LTD	Malaysia	2016	Tanjung Berakit, Kepulauan Riau

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2016

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan MEF Komponen Utama TNI AL terhadap keamanan perairan laut dalam negeri, kekuatan peralatan pertahanan Kebijakan MEF dalam Komponen Utama TNI AL harus memiliki efek pencegahan. Dengan demikian kekuatan alat utama dan sistem persenjataan angkatan laut harus ditingkatkan sehingga operasi / patroli baik lokal maupun di perbatasan mendapat dukungan alat pertahanan yang cukup kuat.

Dengan penambahan kekuatan peralatan pertahanan memiliki implikasi untuk keamanan di wilayah laut. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bedeian dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas adalah *That is, the greater the extent it which an*

organization`s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Bedeian, 1991: 61).

Sebagai bentuk efektivitas, adalah dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang mengawaki peralatan pertahanan yang memiliki teknologi modern / canggih menjadi sangat penting. Kemampuan alat utama dan sistem senjata angkatan laut canggih tanpa dukungan sumber daya manusia yang beroperasi tidak akan efektif merespon kebutuhan masyarakat dalam menghadapi ancaman yang terjadi. Alat-alat utama dan kekuatan sistem persenjataan angkatan laut dan kemampuan sumber daya manusia yang mengawaki alat-alat utama dan sistem senjata angkatan laut akan mencerminkan gengsi bahwa negara-negara lain menjadi enggan kepada bangsa Indonesia.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi kebijakan MEF Komponen Utama TNI AL yang terkait dengan efektivitas, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan MEF Komponen Utama TNI AL belum efektif terhadap kebutuhan keamanan dan kesejahteraan masyarakat akan perairan laut dalam negeri karena ada masih ada pelanggaran. Kemampuan alat utama dan sistem persenjataan angkatan laut sebagian besar belum dilengkapi dengan sistem terintegrasi teknologi terbaru, sehingga belum efektif dan tepat waktu mengidentifikasi, menghalangi dan mengadili ancaman. Kebijakan MEF Komponen Utama TNI AL adalah bentuk kekuatan dasar yang harus memenuhi standar tertentu dan memiliki efek *deterrence*.

2. Implikasi

Implikasi penelitian adalah mengenai evaluasi efektivitas kebijakan MEF Komponen Utama TNI AL adalah sebagai berikut: Kebijakan MEF Komponen Utama TNI AL harus dikaji ulang mengingat, sasaran pencapaian MEF Komponen Utama TNI AL melaksanakan tiga fase dalam jangka

waktu 5 tahun . Ini adalah waktu yang cukup lama untuk mencapai target MEF Komponen Utama yang akan dimiliki Indonesia. Sementara kebutuhan peralatan pertahanan dan elemen lain dalam Kebijakan MEF Komponen Utama diperlukan segera untuk diarahkan untuk memenuhi kekuatan pertahanan militer sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 34 tahun 2004 tentang pertimbangan Keseimbangan Kekuatan TNI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Charles O. Jones, Aprilia. 2009. Human Resource Management. Earth Literacy, Jakarta.
- Creswell, John. W, 2013, the Research Design: Qualitative Approach, Quantitative, and Mixed, Reader Student, Yogyakarta.
- Dunn, William N., 2000. Introduction to Public Policy Analysis Second Edition, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus., 2008. Achieve Good Governance, through Pelayanan Publik. Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Dye, R. Thomas, 1987. Understanding Public Policy (Six Edition),

- Englewood Cliff: Prentice Hall, London.
- Gupta, N.S., and Gupta, Alka, 1992. Management: Principles, Practices and Techniques. Second Revised and Enlarged Edition, Atlantic Publishers & Distributors, New Delhi.
- Headquarters of the Navy, 2010. TNI's doctrine TridharmaEkakarma, Navy Headquarters.
- Indiahono, Dwiyanto, 2009. Dynamic Policy-Based Public Policy Analysis, Publisher Gava Media, Yogyakarta.
- Indonesian Maritime Council, 2005. Draft policy Marine Indonesia, Indonesian Maritime Council.
- Lasswell, Harold D., & Kaplan, Abraham, 1970. Power and Society. Yale University Press., New Haven.
- Mahmudi, 2005. Public Sector Performance Management, Issue I, Book Publishers UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Miles, Matthew B., and Huberman, Michael, 2014. Qualitative analysis of data: a sourcebook methods, SAGE Publications Ltd., London.
- Moleong, Lexi. J., 2001, Qualitative Research Methodology. Bandung: PT. Teens Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, Riant, 2014. Public Policy: Theory, Management Dynamics, analysis, Convergence, and chemical policy, PT Elex Media Gramedia Group Komputindo Jakarta, Jakarta.
- Ohnishi, Ken, 2011. EASR 2011 Chapter 8: The Adoption of the New National Defence Program Guidelines, The Japan Times Ltd., Tokyo.
- Scrivan, Michael, 1981. Evaluation Thesaurus. Third Edition, Edgepress, Inverness, California.
- Subarsono, AG., 2006. Public Policy Analysis: Concepts, Theory and Applications, Student Library, Yogyakarta.

Regulasi:

- Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Perkasal/24/IV/2011 tanggal 19 April 2011 tentang Kebijakan Dasar Pembangunan TNI AL menuju Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force*).
- Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Perkasal/39/V/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang Kebijakan Dasar Pembangunan TNI AL menuju Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force*).

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang *Minimum Essential Force* Komponen Utama

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Per/03/M/XII/2007 tanggal 18 Februari 2008 tentang Buku Putih Pertahanan Negara.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Per/22/M/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Strategi Pertahanan Negara.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Per/23/M/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tanggal 12 September 2013 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara tahun 2010-2014.

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia NomorPerpang/15/2010 tanggal 5 Mei 2010 Tentang Pembangunan Kekuatan Pokok TNI (Minimum Essential Force) Tahun 2010 – 2024.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2000 Tentang Kenavigasian.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.